

Surat Kabar : Kompas  
Subyek : Hutan

Edisi : 13 Juli 2012  
Halaman : 22

### **PERTANAHAN**

#### **Ribuan Hektar Hutan Disengketakan**

SURABAYA, KOMPAS - Puluhan ribu hektar kawasan hutan yang dikelola Perum Perhutani di Jawa Timur masuk dalam sengketa perdata karena diduduki pihak lain. Kondisi itu menurunkan produktivitas hutan.

Kepala Perum Perhutani Unit II Jawa Timur Bambang Budiarto mengatakan, saat ini lahan seluas 39.989,71 hektar berada dalam sengketa. Meski hanya 3,5 persen dari total luas hutan Perhutani Jatim yang mencapai 1,1 juta hektar, sengketa lahan itu berpotensi merugikan negara.

Lahan Perhutani ada yang digunakan masyarakat untuk bermukim turun temurun, digunakan untuk penambangan ilegal, dan ada pula lahan yang diduduki pemilik usaha. "Lahan yang kami kelola adalah milik negara. Jadi, kasus-kasus itu mengurangi aset negara serta menurunkan produktivitas hutan," kata Bambang, Kamis (12/7).

Menurut dia, di sejumlah wilayah sengketa kepemilikan lahan memang melibatkan masyarakat. Mereka biasanya mendiami lahan secara turun temurun sehingga sulit meninggalkan lahan itu. Namun, Perhutani akan terus berupaya mengembalikan lahan tersebut menjadi hutan.

"Kami berupaya mencapai win win solution melalui mediasi. Di Trenggalek, misalnya, sebagian warga sudah mengakui kalau tanah yang mereka tempati itu milik Perhutani. Namun, mereka masih kami biarkan tinggal di situ sampai nanti mendapatkan tempat tinggal baru. Kalau memang tidak mampu mendapat tempat baru, kami sarankan mereka ikut transmigrasi," jelasnya.

Untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan lahan, Perhutani menggandeng Kejaksaan Tinggi Jatim. Menurut Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim Palty Simanjuntak, pihaknya mendukung langkah Perhutani dengan memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, hingga, kalau diperlukan, tindakan hukum.

Potensi sengketa perdata dan tata usaha negara dalam pengelolaan lahan Perhutani cukup tinggi. Ada lagi kasus wanprestasi oleh pelaku usaha. "Untuk memulihkan aset dari penguasaan pihak tak berhak, kami akan utamakan mediasi," ujarnya. (ARA)